

PENCEGAHAN KORUPSI TERHADAP EKONOMI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Ronald Jay Suprayogi¹

¹Universitas Bandar Lampung

Email: ronaldjaysuprayogi@gmail.com

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024

Revised November 2024

Accepted November 2024

Available online November 2024

Kata Kunci:

Dampak Korupsi; Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:

Impact of Corruption; Economy; Public

Welfare



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Bandar Lampung

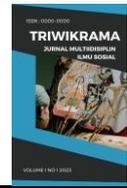
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada praktik korupsi yang terjadi di area parkir Mall Boemi Kedaton, Lampung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tukang parkir dan pengunjung mall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi, seperti pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu, mengakibatkan penurunan pendapatan tukang parkir dan menciptakan ketidakpastian biaya bagi pengunjung. Dampak negatif ini berdampak pada frekuensi kunjungan ke mall, sehingga mengganggu perekonomian lokal dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana korupsi berkontribusi pada meningkatnya harga barang dan kesulitan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ditemukan bahwa langkah-langkah pemberantasan korupsi yang lebih efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of corruption on the economy and community welfare, focusing on corrupt practices that occur in the parking area of Boemi Kedaton Mall, Lampung. The method used is a qualitative approach through in-depth interviews with parking attendants and mall visitors. The results showed that corrupt practices, such as illegal levies committed by certain individuals, resulted in a decrease in parking attendants' income and created cost uncertainty for visitors. These negative impacts have an impact on the frequency of visits to the mall, thus disrupting the local economy and lowering community welfare. In addition, the study also identified how corruption contributes to rising prices of goods and difficulty in accessing education and health services. It was found that more effective corruption-fighting measures are needed to create a more transparent and fair environment, and improve the overall well-being of the community. This research is expected to provide insights and recommendations for the government and society in their efforts to eradicate corruption.

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindakan yang sangat merusak dan mencerminkan perilaku tidak bermoral, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Tindak pidana korupsi umumnya mencakup serangkaian aktivitas yang menunjukkan bentuk nyata dari tindakan korupsi itu sendiri. Korupsi sering kali terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan atau otoritas dalam pemerintahan atau lembaga lainnya, seperti aparatur sipil negara atau pegawai negeri, menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak patut. Mereka memanfaatkan posisi dan kewenangan yang dimiliki untuk

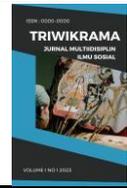


memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak lain yang tidak seharusnya mendapatkannya. Dengan menggunakan kekuasaan mereka secara tidak sah, tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas, kepercayaan publik, dan keberlangsungan sistem pemerintahan yang seharusnya adil dan transparan (Hasan, 2018).

Di tengah upaya pembangunan nasional yang sedang berlangsung di berbagai sektor, aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan segala bentuk penyimpangan lainnya semakin menguat. Keinginan ini muncul seiring dengan kesadaran bahwa korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak buruk yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam realitasnya, tindak korupsi telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara, yang pada gilirannya dapat memicu krisis di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, kebutuhan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi semakin mendesak. Langkah-langkah intensif harus diambil, namun tetap dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat luas. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun mekanisme yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya korupsi, agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan tanpa terganggu oleh perilaku menyimpang yang merugikan negara (Wahyudi, 2018).

Korupsi memiliki dampak negatif yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam bidang perekonomian, yang merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Di sektor publik, korupsi menghambat pembangunan ekonomi dengan memperlambat distribusi anggaran dan menurunkan efisiensi pelayanan publik. Sementara itu, di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya operasional melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak yang tidak terpenuhi. Ketika korupsi merajalela, perekonomian secara keseluruhan akan terhambat, menimbulkan berbagai masalah seperti penurunan tingkat investasi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Negara yang dilanda korupsi mengalami kesulitan menarik investasi karena investor harus menghadapi risiko kehilangan keuntungan akibat pembayaran ilegal, waktu yang terbuang untuk bernegosiasi dengan pejabat korup, dan potensi putusnya kontrak karena penyelidikan hukum. Semua ini pada akhirnya merusak iklim bisnis dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan Masyarakat (Gunawan et al., 2024).

Korupsi telah menjadi masalah yang mengakar dalam sejarah Indonesia, mulai dari era monarki tradisional, masa kolonialisme, hingga setelah kemerdekaan. Dari masa ke masa, korupsi terus berkembang dan merusak tatanan politik, ekonomi, serta sosial. Pada masa monarki, korupsi sering terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh raja-raja dan bangsawan, yang memperkaya diri dengan merampas kekayaan rakyat. Selama era kolonialisme, praktik korupsi semakin terstruktur dalam sistem birokrasi penjajahan yang menindas rakyat pribumi.



Setelah Indonesia merdeka, meskipun pemerintahan dipegang oleh bangsa sendiri, korupsi tetap merajalela di berbagai level pemerintahan dan sektor ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam dampak dari korupsi terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang merajalela mengakibatkan banyaknya dana publik yang diselewengkan, memperlambat pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas layanan publik, dan merusak iklim investasi. Dampak buruk ini akhirnya dirasakan oleh masyarakat luas, yang mengalami kemerosotan kesejahteraan karena pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang tinggi, dan akses yang minim terhadap layanan publik yang layak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami lebih jauh bagaimana korupsi mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, serta bagaimana langkah-langkah efektif dapat diambil untuk memeranginya (Amalia, 2022).

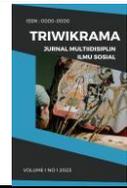
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat umum dan tukang parkir, untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai topik yang diteliti. Objek penelitian ini adalah area parkir di Mall Boemi Kedaton, Lampung, yang dipilih sebagai lokasi kajian karena mewakili lingkungan sosial yang dinamis, di mana interaksi antara pengunjung, petugas parkir, dan masyarakat sekitar dapat diamati secara langsung. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait isu yang diangkat dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada area parkir di Mall Boemi Kedaton, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengunjung mall dan tukang parkir. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kasus korupsi merupakan permasalahan yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia, menjadi sebuah tantangan serius yang menghambat kemajuan bangsa. Korupsi sering kali terkait erat dengan kekuasaan, di mana individu atau kelompok yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan atau organisasi berisiko besar untuk menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni. Maraknya praktik korupsi di Indonesia sering kali dipicu oleh keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan posisi seseorang, sehingga berbagai

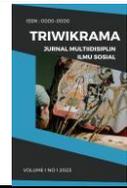


cara diambil untuk mengamankan keuntungan material atau politik. Dampak dari perilaku korupsi ini sangat luas dan merugikan, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di sektor perekonomian, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kualitas infrastruktur. Selain itu, korupsi juga berpengaruh terhadap budaya, mengubah norma-norma sosial menjadi lebih permisif terhadap praktik-praktik ilegal dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan serupa. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan biaya bisnis dan menciptakan ketidakpastian bagi investor, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing ekonomi. Dari sisi sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, dan menimbulkan ketidakpuasan serta ketidakadilan di masyarakat. Dengan demikian, dampak korupsi sangatlah kompleks dan menuntut perhatian serius dari semua pihak untuk bersama-sama memberantas praktik ini demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Aryani, 2023).

Dari hasil penelitian di atas, didapatkan hasil bahwa praktik korupsi yang teridentifikasi di area parkir Mall Boemi Kedaton melibatkan interaksi antara tukang parkir dan oknum yang meminta uang tambahan di luar tarif resmi. Praktik ini menciptakan situasi di mana tukang parkir terpaksa memberikan sebagian pendapatan mereka kepada pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan posisi mereka, sehingga mengurangi penghasilan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, pengunjung mall sering kali merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian biaya parkir dan kemungkinan adanya pungutan liar. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada kesejahteraan tukang parkir, tetapi juga memengaruhi frekuensi kunjungan pengunjung ke mall, yang pada akhirnya dapat mengganggu perekonomian lokal. Temuan ini menunjukkan perlunya tindakan tegas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan area parkir, serta pentingnya dukungan dari pemerintah dan pihak berwenang untuk memberantas praktik korupsi ini demi menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat (Nurrizqilah Putri et al., 2024).

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus maupun besaran kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Mall Boemi Kedaton, terungkap bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat tinggi pemerintahan, tetapi juga merambah ke sektor-sektor informal, seperti parkir. Dalam hal ini, tukang parkir harus menghadapi tekanan untuk memberikan uang tambahan kepada oknum tertentu demi menjaga posisi dan pendapatan mereka. Praktik-praktik semacam ini mencerminkan bahwa korupsi telah menjadi fenomena yang sistematis dan meluas, memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Lamijan, 2022).

Dampak buruk dari korupsi ini terlihat jelas dalam bidang ekonomi, yang merupakan faktor terpenting bagi kesejahteraan rakyat. Korupsi secara signifikan melemahkan investasi dan



pertumbuhan ekonomi, di mana pengunjung mall mengeluhkan biaya parkir yang tidak jelas dan potensi pungutan liar. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dan memengaruhi frekuensi kunjungan ke mall, yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian yang dihadapi pengunjung menghambat kontribusi mereka terhadap pendapatan sektor swasta, yang penting untuk keberlangsungan usaha kecil dan menengah (Bambang Hartono et al., 2022).

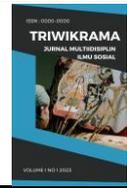
Lebih jauh lagi, maraknya korupsi telah memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, seperti semakin mahalnya harga barang dengan kualitas yang buruk dan akses yang semakin sulit terhadap pendidikan dan kesehatan. Hasil wawancara dengan masyarakat di Mall Boemi Kedaton menunjukkan bahwa mereka merasa frustrasi dengan sistem yang korup, di mana mereka harus membayar lebih untuk mendapatkan layanan yang seharusnya layak. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan sosial dan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kerusakan lingkungan, ancaman terhadap keamanan negara, dan citra buruk pemerintah di mata publik internasional hanya memperburuk kondisi, menyebabkan investor asing enggan berinvestasi di Indonesia (Lestari & Hasan, 2022).

Selain itu, korupsi juga berkontribusi pada menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, yang krusial bagi pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Pendapatan pajak yang berkurang menghambat upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan memfasilitasi program-program pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dampak destruktif korupsi terhadap berbagai aspek ekonomi menunjukkan betapa pentingnya upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara serius dan berkelanjutan (Lamijan, 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, termasuk pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sejak tahun 1960-an. Namun, untuk mencapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat, langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh masyarakat dan institusi yang lebih luas. Penelitian ini menekankan bahwa korupsi merupakan masalah mendesak yang harus diatasi demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, serta memberdayakan masyarakat untuk melawan praktik korupsi, diharapkan dapat tercipta sistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua (Nurrizqilah Putri et al., 2024).

Dampak Ekonomi Di Masyarakat

Ketidak nyamanan yang dirasakan masyarakat akibat praktik korupsi membuat mereka muak. Beberapa masyarakat melaporkan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan biaya ekonomi yang sekarang, yang berdampak pada frekuensi ekonomi mereka dan, secara tidak langsung, berpengaruh pada penjualan usaha mereka.



Hal ini juga dijumpai dari hasil wawancara yang mengatakan "Ketika pengunjung merasa tidak nyaman karena harus membayar lebih, mereka mungkin jadi jarang datang ke sini. Ini bisa mempengaruhi omset toko-toko juga, dan pada akhirnya merugikan semua orang."

Kesejahteraan Masyarakat

Tukang parkir menyatakan bahwa penghasilan mereka yang berkurang akibat praktik korupsi membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ini menciptakan tekanan ekonomi yang lebih besar bagi mereka dan masyarakat sekitar yang bergantung pada pendapatan dari mall.

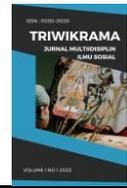
Hal ini pun ditemukan dari hasil wawancara yang mengatakan "Ketika ada pemotongan dari penghasilan karena harus memberikan 'uang jalan' kepada oknum, itu mengurangi pendapatan saya. Akhirnya, saya jadi sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari."

Persepsi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka merasa frustrasi dengan adanya praktik korupsi yang mempengaruhi pelayanan publik, termasuk layanan parkir. Mereka berharap ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan.

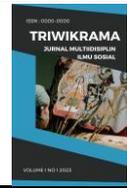
Harapan tersebut disampaikan oleh mereka melalui wawancara "Sebenarnya, saya harap ada pengawasan yang lebih ketat dari pihak pengelola mall dan pemerintah. Kalau semua transparan dan bersih, semua pihak bisa diuntungkan. Kami juga bisa bekerja dengan lebih tenang dan pengunjung pun bisa merasa aman."

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di area parkir Mall Boemi Kedaton memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya mengurangi pendapatan tukang parkir, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi pengunjung, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas ekonomi di area tersebut. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan langkah-langkah konkret dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi di sektor publik. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha.



4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang melibatkan tukang parkir dan oknum tertentu menciptakan ketidakpastian biaya bagi pengunjung, yang mengurangi frekuensi kunjungan dan berdampak negatif pada pendapatan sektor swasta. Selain itu, korupsi juga memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, menyebabkan meningkatnya harga barang dan sulitnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat untuk memberantas korupsi secara efektif, meningkatkan transparansi, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil demi kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Indonesian Journal Of Social And Political Sciences*, 3(1), 54–76.
- Aryani, R. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1487–1490.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, & Heru Budi Khurniawan. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara. *Sol Justicia*, 5(2), 192–204.
- Gunawan, R., Thamliha, A., & Iqbal Hafiz, M. (2024). Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 01(01), 22–29.
- Hasan, Z. (2018). Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2), 135–144.
- Lamijan. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(2), 40–80.
- Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 1–10.
- Nurrizqilah Putri, A., Fernando, R., Lusiana Putri, C., Muhammed Alkasadi, S., & Nurrohmat, D. (2024). Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 50–57. <https://doi.org/10.62017/Merdeka>
- Wahyudi, E. (2018). Korupsi Dalam Peningkatan Perekonomian Di Indonesia. *Lex Jurnalica* , 15(2), 162–172. <https://nasional.tempo.co/>